

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Halim Barkatullah, 2018 Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital E-Commerce di Indonesia, Nusa Media, Bandung.

Dewa Gde Rudy, Et. All, 2016 “Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen” Fakultas Hukum Udayana, Bali.

Djulaeka, dan Devi Rahayu, 2019, “Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum” Scopindo Media Pustaka, Surabaya.

Ishaq, 2017, “Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi”, Alfabeta, Bandung.

Nurul Qamar, Aan Aswari, dan Hardianto Djanggih, 2017, “Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)”, CV Social Politic Genius, Makassar.

P.N.H Simanjuntak, 1999, “Pokok-Pokok Hukum perdata Indonesia”, Djambatan, Jakarta.

Resa Raditio, 2014, Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengeketa, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Roswita Sitompul 2006, “Hukum Perdata Indonesia”, Pustaka Bangsa Press, Jakarta Pusat.

Salim H.S, 2017, “Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak” Sinar Grafika, Jakarta.

Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Raja Grafindo, Jakarta.

Subekti, 2005, “Hukum Perjanjian”, Intermasa, Jakarta.

Subekti, 2003, “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, Intermasa, Jakarta.

Susanto, Et. All, 2019, “Pengantar Hukum Bisnis”, Unpam Press, Banten.

Yulia, 2015, “Buku Ajar Hukum Perdata”, CV. BieNa Edukasi, Aceh.

### B. Jurnal

Afrilian Perdana, Dahlan dan Mahfud, 2014 “Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik”, Vol. 2, No. 1.

- Desy Ary, Setyawati Dahlan dan M.Nur Rasyid, 2017 “Perlindungan Bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”, Vol. 1, No.3.
- Ficky Nento, 2016, “Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Vol. V, No. 6.
- Heldya Natalia Simanullang, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce” Vol 1., No. 1.
- Hetty. 2015 . Analisis Hukum tentang perbuatan melawan hukum dalam ecommerce berdasarkan burgelijke wetboek dan undang-undang nomor 11 tahun 2008, Jurnal wawasan hukum, Vol. 32, No. 1.
- Hendro Nugroho. 2020. “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Transaksi Pinjaman *Online*,” *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7, No. 2.
- Julian Iqbal, 2018, “Perlindungan Bagi Konsumen *Online* Marketplace Melalui Mekanisme *Online* Dispute Resolution”, Vol. 1, No. 2.
- M Muhatarom, 2014, “Asas-Asas Hukum Perjanjian Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, Vol. 26, No. 1.
- Marcel Leonardo Tuela, 2014, “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Barang yang diperdagangkan” Vol. II, No. 3.
- Novi Ratna Sari, 2017, “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”, Vol.IV, No.2
- Roberto Marco dan Bernadheta Tyas Puspa Ningrum, 2017, “Analisis Sistem Informasi *E-Market place* Pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Kerajinan Bambu Dusun Brajan”, Vol. 18, No.2.
- Rosalinda Elsina Latumahina, 2015, “Aspek-Aspek Hukum dalam Transaksi Perdagangan Secara Elektronik”, Vol.4, No.1.
- Ryan Prastya, Mariata Putra, Ida Ayu Putu Widiasti, Ni Made Puspasutari Ujjanti, 2020, “Akibat Hukum Dari Wanprestasi Dalam Transaksi Jual Beli Secara Instagram”, vol 1, No.2.
- Shabur Miftah, Maulana, Heru Susilo, dan Riyadi, 2015, “Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)”, Vol. 29, No. 1.
- Titik Triwulan Tuti, 2008, “Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional”, Prenadamedia Group, Jakarta.

Widi Nugrahaningsig, dan Mira Erlinawari, 2017, "Implementasi UU.No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Bisnis *Online*", Vol. 11, No.01.

### **C. Peraturan Perundang – Undangan**

KUH Perdata, Diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin, 2019, Sinar Grafika, Jakarta.

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad Tahun 1941 No. 44 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yurisprudensi Mahkamah Agung 1 juli 1959 no. 186 K/Sip/1959 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 77/POJK.01/2016.

Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 1 tahun 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5499).